

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan selalu menjadi rintangan utama di negara berkembang, mencerminkan kondisi ketidakmampuan individu dalam rangka memenuhi kebutuhan utamanya. Dalam konteks itu, kemiskinan tidak semata-mata menjadi isu umum, melainkan berfungsi sebagai indikator utama dalam mengevaluasi progres suatu negara. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang kompleks dengan beragam dimensi. Identifikasi kemiskinan dapat dilakukan melalui sejumlah karakteristik yang mencakup berbagai aspek kehidupan individu atau kelompok. Beberapa indikator utama termasuk ketidakmampuan dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar layaknya makanan, pakaian, dan tempat singgah. Selain itu, kemiskinan juga tercermin dalam kurangnya akses terhadap layanan esensial contohnya adalah kebutuhan terkait kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan sarana transportasi

Aspek lain yang dapat menandai kemiskinan adalah absennya jaminan keamanan masa depan, yang dapat disebabkan oleh minimnya investasi dalam bidang pendidikan dan dukungan keluarga. Kemiskinan juga dapat membuat seseorang atau kelompok rentan terhadap perubahan baik dari segi individual maupun kolektif yang tidak terduga. Mutu kemampuan personal dan keterbatasan dalam hal kekayaan alamiah juga dapat menjadi faktor dalam identifikasi kemiskinan. Selain itu, dalam konteks kehidupan sosial masyarakat, kesempatan untuk mengakses pekerjaan dan kesempatan kerja yang stabil, serta kapasitas untuk

berusaha dapat menjadi indikator kemiskinan. Pembatasan fisik atau mental juga dapat membatasi kemampuan seseorang untuk mencari nafkah. berusaha dapat menjadi indikator kemiskinan. Pembatasan fisik atau mental juga dapat membatasi kemampuan seseorang untuk mencari nafkah.

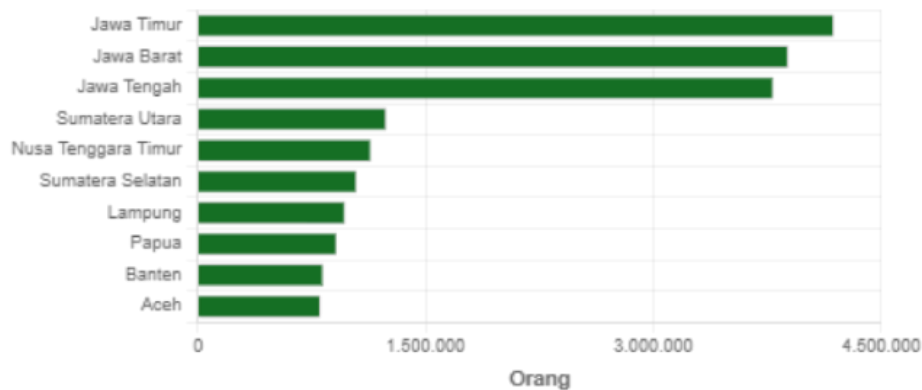
Kondisi sosial yang tidak menguntungkan, seperti anak-anak yang terabaikan, perempuan penyintas kekerasan internal keluarga, janda yang hidup dalam kemiskinan, serta kelompok-kelompok yang terisolasi juga dapat menjadi ciri khas dari situasi kemiskinan. Dengan memperhatikan berbagai aspek ini, kita dapat lebih komprehensif dalam mengidentifikasi dan memahami masalah kemiskinan. (Suharto, 2021). Pengukuran kemiskinan umumnya dilakukan melalui pendekatan ekonomi yang mempertimbangkan pendapatan finansial dan manfaat non-material yang diterima seseorang. Disisi lain, kemiskinan juga sering diartikan sebagai kondisi dengan keterbatasan dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan yang buruk, dan keterbatasan akses transportasi bagi masyarakat (Suharto, 2021).

Pengurangan materi harus menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan, baik di tingkat daerah atau pusat, dengan menerapkan sistem perlindungan sosial. Kemiskinan bukan hanya masalah kecil, tetapi juga memiliki dampak besar yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat jika tidak segera ditangani. Meskipun tidak mungkin untuk menghindari kemiskinan sepenuhnya, namun upaya dapat dilakukan untuk mengurangi dampaknya. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Sosial, telah mengimplementasikan langkah-langkah yang terintegrasi dalam upaya mengatasi kemiskinan dengan menerapkan berbagai

program langsung. Salah satu di antaranya adalah Program Keluarga Harapan yang diatur dalam Peraturan Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

Program ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga yang hidup dalam kondisi berkekurangan dengan memperluas jangkauan terhadap pelayanan di bidang kesehatan, kemakmuran sosial, dan pendidikan melalui implementasi skema jaminan sosial sosial yang terstruktur, tersusun, dan *sustainable*. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat melalui jangkauan dan pemanfaatan berbagai fasilitas yang tersedia. Sebagai otoritas utama negara, pemerintah berupaya mencegah kemiskinan dengan menerapkan program-program yang pro-masyarakat miskin, contohnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Inisiatif ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk serta mengatasi tantangan yang terkait dengan kemiskinan.

Berdasarkan informasi oleh Institusi statistik pemerintah BPS, pada tahun 2023, persentase penduduk yang hidup dalam kondisi kemiskinan mengalami penurunan menjadi 9,36%, turun sebesar 0,21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Populasi penduduk miskin pada periode tersebut mencapai 25,90 juta jiwa, mengalami penurunan sebesar 0,72 juta jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di perkotaan, persentase penduduk miskin pada awal tahun 2023 turun menjadi 7,29% dari 7,53% pada akhir tahun 2022. Sedangkan di pedesaan, persentase penduduk miskin pada awal tahun 2023 juga menyusut menjadi 12,22% dari 12,36% pada kuartal III tahun 2022. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di perkotaan sebesar 0,24 juta jiwa, menurun dari 11,98 juta jiwa di akhir tahun 2022 menjadi 11,74 juta jiwa pada awal tahun 2023.



Gambar 1. 1 Jumlah Kemiskinan di Indonesia Tahun 2023

Sumber: BPS Pusat Tahun 2023 (diakses pada 6 Desember 2023 pukul 12.45)

Kota Surabaya memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, yang tercantum didalamnya adalah mengenai strategi yang ditekankan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin serta meningkatkan pelayanan kepada penderita yang terdampak permasalahan sosial adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Surabaya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan yang merupakan salah satu topik utama yang muncul didalam kehidupan dan keseharian masyarakat. Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya memiliki presentasi penduduk miskin yang terbilang sangat tinggi di Provinsi Jawa Timur. Dengan banyaknya jumlah penduduk, menjadikan Kota dengan 2.893.698 jiwa penduduk (Data BPS Jatim 2023) tersebut menjadi Kota/Kabupaten peringkat 12 dari 38 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023, tercatat Surabaya memiliki 136.037 jiwa warga miskin yang meluas di 31 kecamatan dan 154 kelurahan, itu artinya Pemerintah Pusat dan Kota harus berkolaborasi untuk dapat menciptakan kota yang bebas dari masalah permiskinan.

Tabel 1. 1 Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota

| NO | Kabupaten/Kota | Tahun | | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Kab. Malang | 276,58 | 252,88 | 251,36 |
| 2 | Kab. Jember | 257,09 | 232,73 | 236,46 |
| 3 | Kab. Sampang | 237,23 | 217,97 | 221,71 |
| 4 | Kab. Sumenep | 224,73 | 206,20 | 206,61 |
| 5 | Kab. Probolinggo | 223,32 | 203,23 | 205,02 |
| 6 | Kab. Bangkalan | 215,97 | 196,11 | 196,66 |
| 7 | Kab. Tuban | 192,58 | 178,05 | 177,25 |
| 8 | Kab. Kediri | 184,49 | 169,46 | 171,18 |
| 9 | Kab. Pasuruan | 159,78 | 148,62 | 154,09 |
| 10 | Kab. Bojonegoro | 166,52 | 153,40 | 153,25 |
| 11 | Kab. Lamongan | 166,82 | 151,08 | 149,94 |
| 12 | Kab. Gresik | 166,35 | 149,64 | 149,75 |
| 13 | Kota Surabaya | 152,49 | 138,21 | 136,37 |
| 14 | Kab. Pamekasan | 137,12 | 126,02 | 126,43 |
| 15 | Kab. Ngawi | 130,81 | 119,02 | 121,30 |
| 16 | Kab. Banyuwangi | 130,93 | 122,01 | 119,52 |
| 17 | Kab. Sidoarjo | 137,15 | 125,69 | 119,15 |
| 18 | Kab. Jombang | 127,30 | 115,48 | 117,36 |
| 19 | Kab. Nganjuk | 125,53 | 113,63 | 115,86 |
| 20 | Kab. Mojokerto | 120,54 | 111,03 | 112,86 |
| 21 | Kab. Bondowoso | 115,18 | 105,69 | 105,13 |
| 22 | Kab. Blitar | 112,62 | 101,94 | 101,94 |
| 23 | Kab. Lumajang | 105,25 | 95,04 | 93,82 |
| 24 | Kab. Ponorogo | 89,94 | 81,80 | 83,71 |
| 25 | Kab. Situbondo | 86,95 | 81,46 | 82,62 |
| 26 | Kab. Pacitan | 84,19 | 76,93 | 76,20 |
| 27 | Kab. Madiun | 81,61 | 74,07 | 75,87 |
| 28 | Kab. Trenggalek | 84,89 | 76,75 | 74,58 |
| 29 | Kab. Tulungagung | 78,59 | 70,52 | 68,81 |
| 30 | Kab. Magetan | 67,75 | 62,65 | 62,49 |
| 31 | Kota Malang | 40,62 | 38,56 | 37,78 |
| 32 | Kota Kediri | 22,55 | 21,15 | 21,03 |
| 33 | Kota Probolinggo | 17,91 | 16,16 | 15,86 |
| 34 | Kota Pasuruan | 13,97 | 13,02 | 13,56 |
| 35 | Kota Blitar | 11,33 | 10,65 | 10,61 |
| 36 | Kota Madiun | 9,06 | 8,49 | 8,46 |
| 37 | Kota Mojokerto | 8,37 | 7,88 | 7,65 |
| 38 | Kota Batu | 8,63 | 8,05 | 7,10 |

Sumber : Jawa Timur dalam Angka 2023 (diakses pada 10 November 2023 10.55)

Masalah penyusutan ekonomi tidak hanya terfokus dengan jumlah atau persentase penduduk yang terdampak, melainkan juga memerlukan penilaian terhadap tingkat kedalaman dan keparahan perkara masalah tersebut. Indeks kedalaman kemiskinan mencerminkan sejauh mana pengeluaran rata-rata penduduk miskin berada di bawah ambang batas kemiskinan. Pada tahun 2023, tingkat kedalaman kemiskinan (P1) mencapai 0,71, sementara indeks keparahan kemiskinan (P2) berada pada angka 0,16.

Tabel 1. 2 Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan di Kota Surabaya Tahun 2021-2023

| Tahun | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 2021 | 0,75 | 0,17 |
| 2022 | 0,69 | 0,18 |
| 2023 | 0,71 | 0,16 |

Sumber: BPS Jatim 2023 (diakses pada 10 November 2023 pukul : 20.59)

Pada tahun 2023, di Kota Surabaya, Kementerian Sosial bersinergi dengan PT Pos Indonesia dan Bank BNI untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Program Keluarga Harapan. Bantuan program PKH dialokasikan untuk 99.115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kantor Pos Kebonrojo, dan meliputi keluarga penerima manfaat sembako dan PKH dan Berikut adalah pernyataan dari Wijayakatwang, selaku Deputy Executive General Manajer KCU Surabaya Kebonrojo.

“... Untuk Saat ini Kantor Pos Indonesia Kebonrojo sampai saat ini untuk penyerahan Bantuan Sosial dari Kemensos tersalurkan sekitar 20% dan targetnya harus selesai sebelum akhir tahun, untuk bantuan sembako dan PKH yang gelontorkan oleh Kemensos bervariasi tergantung jumlah keluarga yang berada dalam satu Kartu Keluarga tersebut.” ucap Wijayakatwang. <https://akuratmedianews.com/bantuan-tahap-pertama-di-tahun-2023-kantor-pos-surabaya-siap-salurkan->

[bansos-dari-kementerian-sosial/](#) (diakses pada 10 Oktober 2023 pukul 14.12 WIB).

Tujuan Program tersebut sebagai inisiatif perlindungan sosial, program ini dengan niat memberikan bantuan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengawasan oleh PT. POS Indonesia sebagai penyelenggara bantuan harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota setempat guna memastikan keamanan dan keabsahan penerima bantuan. Kurangnya koordinasi dalam penyaluran bantuan dapat menimbulkan risiko yang signifikan.

“...Pada saat penyaluran bansos, data tersebut harus di cocokkan dengan KTP maupun Kartu keluarga (KK) penerima. Pada saat daftar penerima yang tertera adalah nama penerima. Pada saat pencairan bisa di wakikan oleh anggota yang tinggal satu kk dengan penerima yang pengambil tersebut berumur 17 tahun keatas,” Kata Wijayakatwang, selaku Deputy Executive General Manajer KCU Surabaya Kebonrojo. <https://akuratmedianews.com/bantuan-tahap-pertama-di-tahun-2023-kantor-pos-surabaya-siap-salurkan-bansos-dari-kementerian-sosial/> (diakses pada 10 Oktober 2023 Pukul 14.25 WIB).

Pemerintah melalui Kementrian Sosial Republik Indonesia membuat peraturan sebagai landasan hukum dalam implementasi Program Keluarga Harapan yang dikeluarkan melalui Peraturan Kementrian Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang dimana Program Keluarga Harapan ini memiliki tujuan untuk mereduksi tingkat keterbatasan penghasilan di Indonesia dengan memberikan bantuan finansial *cash* pada keluarga yang menerima manfaat. Pada tahun 2023, pemerintah telah mengatur penyaluran bantuan BPNT dan PKH dalam empat tahap. Tahap pertama dilakukan pada Januari, Februari, dan Maret, tahap kedua pada April, Mei, dan Juni, tahap ketiga pada Juli, Agustus, dan September, dan tahap terakhir pada Oktober, November, dan Desember (Umsu, 2023).

Pemerintah membatasi jumlah penerima bantuan dalam satu keluarga menjadi maksimal empat orang yang termasuk dalam komponen PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) mencakup tiga komponen utama dalam memberikan pertolongan kepada keluarga penerima manfaat. Komponen pertama mencakup kesehatan melibatkan ibu hamil dan balita, komponen pendidikan melibatkan murid rentang SD hingga SMA dengan usia 7-12 tahun, dan komponen kesejahteraan sosial yang meliputi manula dan difabel berat. Dari lima komponen tersebut, anak usia dini merupakan komponen yang rentang selain dari komponen lansia. Komponen angka usia dini menjadi salah satu komponen penerima bantuan PKH dari sesudah ibu hamil melahirkan dan sudah masuk di kartu keluarga sampai dengan anak tersebut memasuki masa-masa sekolah dasar.

Semampir menjadi kecamatan di Kota Surabaya dengan populasi terbanyak kedua setelah Kecamatan Tambaksari. Penduduk di kecamatan semampir sangat banyak yakni berjumlah 15.171 jiwa pada tahun 2023, selisih 4.483 jiwa dengan kecamatan Tambaksari yang menempati peringkat teratas sebagai kecamatan dengan jumlah populasi terbesar di Kota Surabaya dengan jumlah 19.654 Jiwa.

Tabel 1. 3 Jumlah Masyarakat Miskin di Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2023

| No | Kecamatan | Jumlah |
|----|-----------------|---------------|
| 1 | Tambaksari | 19.654 |
| 2 | Semampir | 15.171 |
| 3 | Sawahan | 13.321 |
| 4 | Wonokromo | 11.973 |
| 5 | Krembangan | 11.512 |
| 6 | Tegalsari | 10.882 |
| 7 | Pabean Cantian | 10.487 |
| 8 | Simokerto | 9.686 |
| 9 | Gubeng | 9.613 |
| 10 | Karang Pilang | 6.074 |

| No | Kecamatan | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 11 | Kenjeran | 5.745 |
| 12 | Wonocolo | 5.509 |
| 13 | Sambikerep | 4.628 |
| 14 | Genteng | 4.429 |
| 15 | Sukolilo | 4.365 |
| 16 | Bubutan | 4.253 |
| 17 | Asemrowo | 3.607 |
| 18 | Sukomanunggal | 3.410 |
| 19 | Dukuh pakis | 3.154 |
| 20 | Mulyorejo | 2.468 |
| 21 | Jambangan | 1.853 |
| 22 | Tandes | 1.733 |
| 23 | Pakal | 1.542 |
| 24 | Trenggilis Mejoyo | 1.526 |
| 25 | Bulak | 1.486 |
| 26 | Rungkut | 1.462 |
| 27 | Wiyung | 1.328 |
| 28 | Lakarsantri | 1.041 |
| 29 | Gunung Anyar | 968 |
| 30 | Benowo | 816 |
| 31 | Gayungan | 689 |

Sumber: Dinas Sosial, Oktober 2023

Kelurahan wonokusumo menjadi kelurahan dengan penduduk tertinggi di Kecamatan Semampir. Tingkat kemiskinan di Kelurahan Wonokusumo ini terbilang cukup besar dan menjadi kelurahan dengan jumlah penduduk miskin paling banyak di Kota Surabaya. Penerima bantuan di kelurahan ini pada tahun 2023 tercatat sebanyak 9.717 penerima (Dinas Sosial Kota Surabaya).

Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk di Kecamatan Semampir

| No | Kelurahan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Wonokusumo | 34.394 | 34.117 | 68.511 |
| 2 | Ujung | 16.535 | 16.481 | 33.016 |
| 3 | Sidotopo | 15.608 | 15.577 | 31.185 |
| 4 | Pegirian | 15.626 | 15.365 | 30.991 |
| 5 | Ampel | 8.972 | 9.166 | 18.138 |

Sumber: Disdukcapil 2023 (diakses pada 16 Oktober 2023 pukul 18.09)

Meskipun tingkat kemiskinan di Kota Surabaya cenderung menurun beberapa tahun terakhir. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Febrina Kusumawati memaparkan data angka kemiskinan ekstrem di Kota Surabaya.

"...Jadi, data kemiskinan ekstrem yang kita terima terakhir sampai tahun 2022, dan mulai 2021-2022 angka kemiskinan ekstrem itu sudah ada penurunan sekitar 0,4 persen, data ini akan terus dituntaskan hingga akhir tahun 2023" <https://news.detik.com/berita/d-7042979/sukses-turunkan-kemiskinan-pemkot-surabaya-dapat-insentif-rp-6-4-m> (diakses pada 6 desember 2023 pukul : 12.21 wib).

Meskipun angka kemiskinan secara keseluruhan di Kota Surabaya menurun, namun kelurahan Wonokusumo mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagai bagian dari kelurahan yang dihuni penduduk miskin terpadat di kota tersebut, Wonokusumo mengalami lonjakan yang cepat. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, tingkat kemiskinan di kelurahan ini terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari tahun 2022 hingga akhir tahun 2023, dengan jumlah keluarga miskin meningkat sebanyak 5.164 jiwa dari 4.533 jiwa pada tahun 2022 menjadi 9.717 jiwa pada akhir tahun 2023.

Selain itu, terdapat fenomena-fenomena yang ada di kelurahan wonokusumo antara lain masih banyaknya keluarga miskin yang kesulitan untuk mengakses pelayanan publik seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan, ketidakaktifan orang tua dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti pemeriksaan balita di posyandu, dan lebih memilih berkegiatan lain yang dapat menghasilkan uang, serta jika ada anggota keluarga miskin yang sakit, mereka hanya mengandalkan obat dari warung dan enggan untuk memeriksakan ke dokter karena tidak memiliki biaya yang cukup dan tidak memiliki asuransi jaminan kesehatan.

Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk Miskin Kecamatan Semampir

| Kecamatan Semampir | Kelurahan | Jumlah Penduduk Miskin | Tahun |
|-----------------------|------------|---------------------------|-------|
| | Wonokusumo | 9.717 | 2023 |
| Ampel | 1.173 | | |
| Pegirian | 2.658 | | |
| Sidotopo | 2.273 | | |
| Ujung | 2.177 | | |

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, November 2023 (diolah peneliti)

Anak usia dini, menjadi faktor krusial yang harus mendapat perhatian pemerintah kota maupun pusat. Dari lima komponen bantuan PKH, anak usia dini menjadi komponen dengan jumlah penerima PKH paling banyak di Kelurahan wonokusumo. Anak usia dini juga perlu mendapatkan jaminan Kesehatan agar tidak mengganggu proses pertumbuhan bagi anak tersebut. Jaminan Kesehatan tersebut dapat berupa fasilitas Kesehatan dan Pendidikan. Oleh karena itu, anak usia dini menjadi kompone utama untuk dapat membangun pondasi di masa depan.

Tabel 1. 6 Jumlah Penerima PKH di Kelurahan Wonokusumo Berdasarkan Komponen

| No | Komponen | Tahun | | |
|----|----------------|-------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Anak Usia Dini | 41 | 49 | 69 |
| 2 | Lansia | 237 | 234 | 397 |
| 3 | Ibu Hamil | 0 | 0 | |
| 4 | Disabilitas | 2 | 2 | 28 |
| 5 | Anak Sekolah | 274 | 269 | 337 |

Sumber: SIKS Kemensos 2022-2024, September 2024

Seperti pada tabel di atas, dijelaskan bahwasannya anak usia dini merupakan komponen penerima PKH dengan jumlah komponen dengan peningkatan yang pesat dan terbanyak ketiga diantara komponen yang lainnya. Pada tahun 2022, komponen anak usia dini sebagai penerima bantuan berjumlah 41 anak usia dini. Kemudian meningkat menjadi 49 anak usia dini pada tahun 2023. Pada tahun 2024

kembali meningkat berjumlah 69 anak usia dini. Untuk komponen penerima bantuan dengan jumlah paling rendah adalah disabilitas dan Ibu Hamil.

Menurut Charles O. John (1996) untuk mengevaluasi implementasi suatu program, perlu memperhatikan indikator-indikator seperti organisasi yang mana para implementor dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan kebijakan yang dibuat, interpretasi yang mana apa yang telah dilakukan oleh implementor sudah sesuai dengan peraturan teknis atau belum, dan aplikasi bagaimana kondisi fakta dilapangan apakah telah ateraplikatif dengan baik atau tidak. Berdasarkan uraian konsep dasar diatas, maka penulis melaksanakan riset dengan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Taraf Hidup Anak Usia Dini di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dibuatlah rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu, “Bagaimana implementasi program keluarga harapan dalam meningkatkan taraf hidup anak usia dini di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah “Untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam terkait implementasi program keluarga harapan dalam meningkatkan taraf hidup anak usia dini di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir Kota Surabaya.”

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah tambahan ilmu mengenai implementasi sebuah program pemerintah, pelayanan publik, dan juga ilmu administrasi publik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan pengetahuan mengenai administrasi publik terkait implementasi program keluarga harapan bagi masyarakat kurang mampu.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas topik penelitian yang sama, serta menambah referensi dan saran sebagai penyempurna untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi bagi masyarakat terkait dengan program keluarga harapan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian bagi masyarakat mengenai implementasi program keluarga harapan.